

KERAGAAN INVESTASI DI SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Muchjidin Rachmat, Saptana, Hermanto *)

ABSTRAK

Pembangunan di subsektor perkebunan tidak terlepas dari peran investasi, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta baik swasta domestik maupun asing. Pemerintah telah merangsang investasi swasta melalui berbagai kebijaksanaan pemerintah khususnya dalam hal kemudahan investasi. Selama periode tahun 1968-1990, perkembangan nilai investasi di subsektor perkebunan yang disetujui oleh pemerintah meningkat dengan laju 17,8 persen per tahun untuk PMDN dan 9,0 persen per tahun untuk PMA. Kenaikan cukup besar terjadi pada PMDN sebagai akibat berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah. Kegiatan investasi perkebunan menyebar di seluruh propinsi, terbesar berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyebaran investasi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan berperannya subsektor perkebunan bagi penyebaran pembangunan. Komoditi yang diminati sebagian besar adalah coklat, karet, dan kelapa sawit, baik di bidang budidaya dan atau pengolahannya. Permasalahan umum yang dijumpai dalam menarik minat investasi di perkebunan adalah persaingan dengan sektor lain sejalan dengan sifat investasi di sektor pertanian umumnya memerlukan modal besar, ketergantungan terhadap faktor alam, memerlukan jangka waktu panjang, seringkali berlokasi di daerah terpencil (bukau baru) serta harga produk pertanian yang tergantung kepada harga pasar dunia. Namun demikian investasi di perkebunan masih prospektif dilihat dari segi pasar dan didukung oleh ketersediaan potensi sumberdaya alam serta situasi negara yang stabil. Usaha untuk menarik minat investasi di perkebunan diperlukan penyebarluasan tentang informasi, baik informasi prospek pasar dan potensi daerah serta kemudahan dalam kegiatan investasi.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor penting, terhadap PDB dalam tahun 1991 sub sektor perkebunan telah menyumbang sekitar 3,20 persen PDB total atau 18,06 persen PDB sektor pertanian. Secara riil peran sub sektor terhadap PDB telah meningkat dari 3.258 milyar rupiah dalam tahun 1987 menjadi sekitar 3.913 milyar rupiah di tahun 1991 atau mengalami peningkatan dengan laju 4,7 persen per tahun. Terhadap penerimaan devisa non migas sub sektor perkebunan juga berperan penting. Peningkatan penerimaan devisa dari komoditi perkebunan telah meningkat dari 1.572,7 juta US dollar di tahun 1981 menjadi 2.202,0 juta US dollar di tahun 1990 (Biro Perencanaan, Departemen Pertanian, 1991).

Perkembangan sub sektor perkebunan tersebut tidak lepas dari peran investasi. Pembangunan ekonomi yang pada hakekatnya merupakan upaya langsung dan tidak langsung dalam pendayagunaan sarana produksi, berupa sumberdaya alam, manusia, modal dan teknologi dalam rangkaian kegiatan investasi. Sehingga investasi merupakan suatu aspek penting dalam proses pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu dalam rangka terus meningkatkan laju pembangunan termasuk di sub sektor perkebunan, pemerintah terus mendorong kegiatan penanaman modal (investasi). Berbagai kebijaksanaan telah dilakukan oleh pemerintahan untuk merangsang kegiatan investasi baik dari dalam negeri (BUMN, swasta dan koperasi) maupun dari luar negeri.

*) Staf Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Bogor.

Tulisan ini mencoba menggambarkan keragaan pengembangan usaha perkebunan, investasi di sub sektor perkebunan termasuk didalamnya pengaruh dari beberapa kebijaksanaan terhadap pertumbuhan investasi di sub sektor perkebunan.

b. Cakupan Analisa

Dalam tulisan ini akan digambarkan keragaan program pengembangan usaha perkebunan dan perkembangan investasi baik yang bersumber dari modal dalam negeri maupun modal asing. Sebaran investasi perkebunan menurut daerah, komoditi yang diminati dan pengaruhnya terhadap pembangunan. Analisa juga mencoba menggambarkan pengaruh dari beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam menarik minat investasi di sub sektor perkebunan.

c. Sumber Data

Dalam menggambarkan keragaan program pengembangan usaha perkebunan, sebagian data dan informasi diperoleh dari Dirjen Perkebunan. Sedangkan data perkembangan investasi diolah dari data primer yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

II. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN

Dalam sub sektor perkebunan, khususnya semenjak diciptakan "Agrarische Wet" tahun 1870, usaha perkebunan telah berkembang menjadi 2 bentuk usaha yaitu usaha perkebunan rakyat dan usaha perkebunan besar. Pada masa penjajahan usaha perkebunan besar merupakan milik pengusaha dari dunia Barat yang sebagian besar dimiliki oleh Belanda, Inggris, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lain, dan sedikit dimiliki oleh bangsa Timur seperti Jepang dan Cina. Pengusahaan perkebunan besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia jumlahnya sangat terbatas dan dimiliki oleh keluarga kerajaan/

kesultanan di beberapa wilayah (Dirjen Perkebunan, 1991).

Setelah masa kemerdekaan jumlah perusahaan perkebunan milik bangsa Indonesia (swasta nasional) bertambah, namun masih dalam jumlah yang sangat terbatas yang umumnya sebagai pengalihan dari kebun perusahaan asing yang tidak terurus. Pertambahan yang berarti terjadi pada permulaan tahun 1960-an, yaitu dengan dilaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960), yaitu dalam rangka konversi hak atas tanah perusahaan perkebunan asing dan hak konsesi dan erpacht menjadi Hak Guna Usaha, areal perkebunan asing tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah sebanyak 10 persen dan areal tersebut oleh pemerintah diberikan kepada pengusaha nasional.

Sampai dengan permulaan tahun 1980, boleh dikatakan tidak terjadi lagi pertambahan perkebunan besar milik swasta nasional. Namun dengan bertambah baiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya kemampuan penyediaan dana untuk investasi dalam jangka panjang, maka telah muncul pengusaha nasional generasi kedua, dengan karakter cara pengelolaan, enterpreneur, skala usaha dan sifat integrasi usaha yang terkait dengan aktivitas di sektor lain, yang berbeda dengan karakter pengusaha nasional sebelumnya (Dirjen Perkebunan, 1991).

Sejalan dengan sejarah perkembangan pengusaha tersebut, maka di usaha perkebunan saat ini terdapat 3 kelompok dunia usaha perkebunan yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar milik negara dan perkebunan besar swasta. Usaha milik swasta tersebut digolongkan dalam swasta nasional termasuk di dalamnya koperasi dan swasta asing.

a. Pengembangan Perkebunan Rakyat

Perkebunan rakyat berperan besar dalam sumber pendapatan dan perataan pembangunan seperti terlihat dari peran luas areal dan produksi. Namun usaha perkebunan rakyat mempunyai kelemahan di bidang teknologi budidaya dan manajemen yang ditunjukkan oleh produktivitas yang rendah.

Usaha-usaha untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani pekebun dimulai sejak Pelita II,

yang dalam pelaksanaannya dimulai melalui pendekatan kegiatan (*activity approach*) seperti pembibitan, demplot dan lainnya. Pada akhir Pelita II, Pelita III dan sampai Pelita IV pendekatan pembinaan dirubah menjadi pendekatan proyek (*project approach*) yang dilakukan secara terpadu melalui penyediaan dana kredit lunak jangka panjang. Kegiatan proyek tersebut meliputi: (a) Pola Unit Pelaksana Proyek (UPP) dan Proyek Peremajaan Perkebunan Tanaman Ekspor (PRPTE) untuk perkebunan rakyat yang sudah ada, dan (b) Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dilaksanakan di wilayah bukaan baru.

Kegiatan Pola PIR adalah membangun dan membina usaha perkebunan rakyat di wilayah bukaan baru dengan menggunakan teknologi maju agar mampu memperoleh pendapatan secara layak dan sebagai upaya pengembangan usaha rakyat dalam berkooperasi dengan mewujudkan suatu sistim pengelolaan usaha yang memadukan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil. Dalam pelaksanaan pola PIR, Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta berperan sebagai Inti sedangkan rakyat peserta PIR sebagai plasma. Sampai dengan Pelita IV. terdapat 3 jenis pola PIR yaitu PIR lokal, PIR khusus dan PIR berbantuan.

Dengan semakin terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah dan dengan adanya deregulasi perbankan maka penyediaan dana untuk Proyek PIR khusus, PIR lokal, dan UPP swadana tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu dalam pelita V dilakukan upaya terobosan khususnya dari segi pendanaan dan penyesuaian pengaturan proyek. Secara garis besar terobosan tersebut adalah : (a) Proyek PIRSUS/ NES diadakan modifikasi menjadi PIR-TRANS, yang berarti meningkatkan upaya pengembangan perkebunan dengan program transmigrasi, (b) untuk PIR lokal dimodifikasi melalui kegiatan pola KIK plasma PIR yang dilakukan secara langsung atau tahap awal melalui pola swadaya, (c) melalui KIK plasma PIR juga dilakukan pola terobosan sebagai pengembangan wilayah khusus, sebagai akibat keterbatasan jangkauan fasilitas pelayanan dan kondisi sumber alamnya. Kegiatan pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus (PWK) ini terutama ditujukan pada daerah-daerah Indonesia Bagian Timur, wilayah Daerah Aliran Sungai (Upland), wilayah terpencil (tertinggal), wilayah pantai (pasang surut) dan wilayah kritis.

Karakteristik dari PIR lokal, PIRSUS, PIR berbantuan dan PIR-TRANS tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Beberapa perbedaan pokok antara PIR lokal, PIR khusus, dan PIR berbantuan dan PIR-TRANS

No.	Uraian	PIR Lokal	PIR Khusus	PIR Berbantuan	PIR Trans
1.	Tanaman Pokok (ha)	2	2	2	2
2.	Lahan pangan (ha)	-	0,75	0,75	-
3.	Lahan pekarangan (ha)	-	0,25	0,25	0,5
4.	Peserta	Penduduk *) lokal/setempat	Transmigran **) lokal/setempat	Penduduk ***) dan transmigran	Penduduk lokal
5.	Rumah	-	Ada	Ada	Ada
6.	Lokasi	Sekitar perkebunan yang sudah ada (existing)	Bukaan baru	Bukaan baru	Bukaan baru
7.	Sumber dana	Swadana	Swadana	Bantuan Luar Negeri	Kredit Swadana

Keterangan: *) Buruh tani, penyakap, perambah hutan, petani lainnya.

**) Transmigran dan penduduk setempat yang lahannya terkena proyek.

***) Prioritas penduduk lokal/setempat, selebihnya transmigran.

Sumber: Wirawan 1985, Madecor, 1989.

PIR LOKAL

- Diproses dari atas
- Disalurkan melalui DIPP DitjenBun sebagai peminjam
- Petani dan Bank kurang terlibat sejak awal
- Akad kredit petani dan Bank setelah konversi
- Membebani APBN
- Resiko Pemerintah
- Luas 1 - 2 ha

KIK Plasma PIR

- Diproses dari bawah
- Disalurkan langsung kepada petani
- Petani dan Bank langsung terlibat sejak awal
- Akad kredit petani dan Bank sejak awal tanpa konversi
- Tidak membebani APBN
- PT. Askindo
- 0,5 - 5 ha

Sampai dengan tahun 1991, program PIR/NES, telah dilaksanakan di 83 lokasi pada areal 499.726 ha, menyebar di 19 propinsi di Indonesia. Komoditi yang paling banyak diusahakan adalah karet, menyusul kelapa sawit, kelapa, kapas, teh, tebu dan kakao. Sedangkan dalam pelaksanaan program PIR TRANS, telah dilibatkan 51 perusahaan swasta dan 5 perusahaan negara (PTP) sebagai inti. Berdasarkan rencana yang disetujui ke 56 perusahaan tersebut akan mengelola areal seluas 746.029 ha, yang terdiri dari kebun inti 219.969 ha (29,5 persen) dan kebun plasma seluas 526.000 ha (70,5 persen). Komoditi yang diminati dan disetujui adalah kelapa sawit, kelapa hibrida dan kakao, dengan sebaran lokasi di 11 propinsi di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam perkembangan pelaksanaan program KIK Plasma PIR, dalam tahun 1990, telah disetujui ijin prinsip bagi pengembangan komoditi kakao di 8 lokasi (oleh 7 perusahaan), kelapa sawit 3 lokasi (oleh 3 perusahaan), kopi di 2 lokasi oleh satu perusahaan, teh di 2 lokasi (oleh 2 perusahaan) dan lada di satu lokasi oleh satu perusahaan.

b. Pengembangan Perkebunan Besar

Disamping perkebunan rakyat, telah pula tumbuh usaha perkebunan besar dengan produk yang sama dan dengan skala dan manajemen yang berbeda. Walaupun titik berat pembangunan perkebunan lebih diarahkan kepada peningkatan perkebunan rakyat, namun kehadiran dari peningkatan perkebunan besar mempunyai arti yang strategis (Dirjen Perkebunan 1991), karena: (a) perkebunan besar yang dikelola secara modern merupakan sumber teknologi terapan

yang sangat baik dari segi manajemen, tehnik budi-daya dan teknologi pengolahan hasil, (b) perkebunan besar merupakan sumber dari sumberdaya manusia yang bermutu tinggi mengoperasikan usaha perkebunan, (c) karena sifat skala usahanya, perkebunan besar dapat mengoperasikan teknologi perkebunan yang cukup tinggi, (d) perkebunan besar karena dikelola secara modern mempunyai akses berbagai perkembangan di luar subsektor perkebunan seperti kelembagaan keuangan dan pemasaran hasil, (d) dalam pengembangan wilayah baru perkebunan besar lebih dapat berperan sebagai perintis, dan (f) dari pengalamannya perusahaan besar dapat berperan dalam pengembangan rakyat sebagai perusahaan inti dalam pengembangan program PIR.

Upaya mendorong tumbuhnya perkebunan skala besar baik BUMN maupun swasta telah lama dilakukan sebelum dilakukannya berbagai paket kebijaksanaan, yang antara lain melalui program PBSN sejak tahun 1976. Program tersebut berupaya merangsang minat sektor swasta melalui pemberian kemudahan-kemudahan seperti fasilitas permodalan/kredit dan dukungan teknologi. Program PBSN telah mencapai tiga tahapan dengan pedoman kebijaksanaan seperti tercantum dalam Tabel 2.

Dalam pelaksanaan investasi, permohonan dalam rangka program kredit PBSN didahului oleh adanya Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan (PPUP) dan dilanjutkan dengan mengajukan kredit investasi kepada pihak perbankan. Jika pengusaha ini memanfaatkan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka kepengurusan HGU dapat dilakukan melalui jalur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perkembangan dan Persetujuan Ijin Prinsip Usaha Perkebunan (PPUP), HGU dan pemberian rekomendasi PBSN dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut.

Dari tabel di atas terlihat: (a) apabila PPUP dapat dianggap sebagai indikator minat dari pengusaha untuk investasi di bidang perkebunan, maka dalam 10 tahun terakhir terlihat adanya indikasi peningkatan minat investasi, peningkatan tersebut mencapai puncaknya dalam tahun 1990, (b) dalam 10 tahun terakhir telah diberikan PPUP kepada 646 perusahaan meliputi areal 3,8 juta ha, (c) Dari 646 perusahaan yang memperoleh PPUP tersebut sejumlah

Tabel 2. Perkembangan kebijaksanaan PBSN 1 s/d III

Uraian	PBSN I	PBSN II	PBSN III
1. Landasan	SKB DitjenBun dengan BEII tgl. 18-8-1976	SK Mentan tgl.22 Agustus 1981	Ditambah SE-BI tgl.7 April 1987
2. Bank pelaksana	BEII	Bank pemerintah	Bank pemerintah
3. Jenis kegiatan	-Rehabilitasi/Intensifikasi -Peremajaan	-Rehabilitasi/Peremajaan -Perluasan -Bukaan baru	-Rehabilitasi/Peremajaan -Perluasan
4. Komoditi	Karet, K. sawit, Teh, Kopi	Karet, Kelapa, K. sawit, Kopi, Kakao	Karet, K. sawit, Kopi, Teh, Kakao
5. Kelas kebun	I & II	I s/d IV	I s/d V
6. Bunga kredit	12%	12%	12%
7. Equity	10%	10%	-10% untuk usaha yang sudah ada -30% untuk usaha baru

Sumber: Dirjen Perkebunan, 1989.

Tabel 3. Perkembangan pemberian Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan (PPUP), Hak Guna Usaha (HGU) dan rekomendasi PBSN

Tahun	PPUP		HGU		Program PBSN	
	Perusahaan	Ha	Perusahaan	Ha	Perusahaan	Ha
1981	6	52.800	21	31.219	33	29.152
1982	1	7.000	19	12.850	36	53.941
1983	2	21.500	30	32.702	13	22.852
1984	8	36.890	39	37.965	16	39.611
1985	7	19.790	54	90.774	34	54.350
1986	28	114.135	53	129.022	57	195.534
1987	50	248.225	37	94.193	29	84.339
1988	122	571.218	55	150.101	41	110.197
1989	151	736.032	60	130.758	71	136.125
1990	196	1.277.189	39	133.081	233	985.081
1991 *)	75	724.629	21	48.539	1	3.000
Jumlah	646	3.809.408	428	891.024	564	1.714.183

Sumber: Dirjen Perkebunan, 1991.

lah 428 perusahaan telah diberikan HGU seluas 891 ha, dan (d) dalam 10 tahun terakhir juga telah dikeluarkan rekomendasi kredit bagi 564 perusahaan dalam rangka investasi seluas 1,7 juta ha, termasuk didalamnya kegiatan peremajaan dan tanaman yang sudah tua dan konversi tanaman.

Aktivitas pemberian PPUP, HGU dan rekomendasi PBSN/PSN tersebut menyebar baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Teng-

gara, Maluku dan Irian Jaya. Berdasarkan ijin pemberian PPUP, HGU, PBSN/PSN maka daerah (pulau) yang diminati investor berturut-turut Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan baru wilayah Indonesia Bagian Timur. Sedangkan dari komoditi yang diminati dan disetujui dalam 10 tahun terakhir, proporsi minat terbesar investasi perkebunan adalah karet, menyusul kelapa sawit dan kakao.

III. PERKEMBANGAN INVESTASI DI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

Untuk dapat menggambarkan lebih rinci tentang investasi di perkebunan maka analisa dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data investasi yang bersumber dari BKPM. Data yang tersedia berupa persetujuan penanaman modal memang kurang menggambarkan besarnya investasi yang sesungguhnya dan baru dapat menggambarkan potensi investasi, karena beberapa kegiatan masih dalam proses atau belum terealisasi. Adanya beberapa perbedaan istilah dan waktu analisa menyebabkan dimungkinkannya terdapat perbedaan antara hasil olahan dengan hasil yang dipublikasikan oleh BKPM. Perbedaan juga dapat terjadi karena adanya pencabutan dari kegiatan investasi yang semula disetujui, namun demikian dengan tujuan melihat perkembangan yang lebih rinci maka hasil olahan ini dapat menggambarkan situasi investasi di sub sektor perkebunan.

a. Perkembangan Potensi Investasi

Berdasarkan data yang dipublikasikan BKPM, kumulatif penanaman modal yang disetujui BKPM seperti tercantum dalam Tabel 4.

Berdasarkan data tersebut dalam periode tahun 1967/1968 sampai Oktober 1991, terdapat 440 proyek perkebunan PMDN dan 42 proyek PMA. Proporsi dari proyek investasi PMDN di perkebunan

relatif lebih besar dibandingkan PMA. Proyek-proyek perkebunan PMDN merupakan 44,6 persen dari total proyek pertanian atau 6 persen dari total proyek seluruh sektor, sedangkan proyek PMA di perkebunan sebesar 35,9 persen dari proyek PMA di pertanian atau hanya 2 persen dari proyek PMA di seluruh sektor.

Dilihat dari nilai yang disetujui, besarnya nilai proyek perkebunan yang disetujui mencapai 16.316,5 milyar rupiah untuk PMDN dan 678,7 juta dollar US untuk PMA. Dilihat dari besarnya nilai investasi tersebut, besarnya nilai proyek PMDN di perkebunan tersebut merupakan 70,7 persen dari nilai proyek di sektor pertanian atau 8,9 persen dari nilai proyek total sektor. Sedangkan di PMA proporsi tersebut adalah 48,9 persen dari nilai proyek di sektor pertanian dan 1,4 persen dari nilai proyek seluruh sektor.

Dilihat dari nilai proyek per unit di sektor pertanian, lebih besarnya proporsi nilai proyek di sub sektor perkebunan dibanding proporsi jumlah proyeknya, menggambarkan nilai per unit sub sektor perkebunan relatif lebih besar dibandingkan proyek pertanian di luar perkebunan. Kondisi tersebut terjadi pada proyek secara keseluruhan pada PMDN, tetapi tidak berlaku bagi proyek PMA.

Hasil olahan data investasi tahun 1968-1990 menunjukkan terdapat sejumlah 555 kegiatan investasi PMDN dengan nilai investasi 12.729,5 milyar rupiah dan 77 kegiatan investasi PMA dengan nilai proyek 836,6 juta dollar (Tabel 5). Definisi kegiatan yang

Tabel 4. Kumulatif persetujuan penanaman modal di sub sektor perkebunan tahun 1967/1968 - 31 Oktober 1991

Uraian	PMDN	PMA
A. Jumlah proyek perkebunan	440,0	42,0
- % terhadap proyek pertanian	44,6	35,9
- % terhadap proyek total sektor	6,0	2,0
B. Nilai Proyek Perkebunan 1)	16.316,5	678,7
- % terhadap nilai proyek pertanian	70,7	48,9
- % terhadap nilai proyek total sektor	8,9	1,4

Sumber: BKPM (1991)

Keterangan : 1) PMDN dalam milyar rupiah
PMA dalam US \$ juta.

Tabel 5. Kumulatif jumlah kegiatan dan nilai investasi sub sektor perkebunan yang disetujui, Januari 1968 sampai Maret 1990

Sumber modal	Jumlah kegiatan	Nilai investasi *)	%
1. PMDN	555	122.729,5	-
2. PMA	77	836,6	100,0
a. Amerika	4	43,9	5,2
b. Belgia	16	453,8	54,2
c. Hongkong	4	147,3	17,6
d. India	1	0,6	0,07
e. Inggris	32	163,7	19,6
f. Jepang	10	20,4	2,4
g. Jerman	1	1,1	0,1
h. Panama	6	1,3	0,1
i. Gabungan	3	4,3	0,5

Sumber: BKPM (diolah)

Keterangan: *) PMDN dalam milyar rupiah PMA dalam US \$ juta.

dipakai adalah setiap aktivitas investasi yang secara spesifik mempunyai SPT tertentu. Suatu perusahaan dapat mempunyai lebih dari satu kegiatan proyek dengan SPT tertentu.

Dari kegiatan investasi PMA, terdapat 8 negara yang menanamkan modal di Indonesia, secara lebih rinci jumlah kegiatan investasi terbanyak dilakukan oleh Inggris, tetapi nilai investasi terbesar berasal dari Belgia.

Sejak tahun 1968 - Maret 1990, jumlah kegiatan dan nilai investasi terus meningkat. Peningkatan secara nyata terlibat dari investasi PMDN, apabila dalam tahun 1968 nilai investasi baru 0,1 milyar rupiah, dalam tahun 1989 nilai investasi PMDN tersebut sebesar 3.131,7 milyar rupiah atau mengalami peningkatan dengan laju 17,82 persen per tahun. Peningkatan nilai investasi PMDN cukup besar terjadi mulai dalam Pelita III. Kondisi serupa juga terjadi dalam investasi PMA. Berkembangnya investasi PMA secara nyata terjadi mulai tahun 1976 dan menunjukkan keragaan yang meningkat, walaupun fluktuatif. Puncak investasi PMA, terjadi dalam tahun 1985 senilai 206,6 juta US dollar. Informasi secara keseluruhan tentang perkembangan investasi PMDN dan PMA di sub sektor perkebunan dapat disimak pada Tabel 6 berikut.

b. Sebaran Investasi Antar Daerah

Kegiatan investasi di sub sektor perkebunan baik oleh PMDN maupun PMA menyebar di seluruh propinsi di Indonesia kecuali Timor Timur. Penyebaran lebih merata terutama terjadi pada investasi oleh PMDN yaitu di 25 propinsi kecuali Sulawesi Tenggara dan Timor Timur, sedangkan investasi PMA di 12 propinsi.

Berdasarkan sebaran menurut wilayah (pulau) kegiatan dan nilai investasi di sub sektor perkebunan sebagian besar berada di Pulau Sumatera, baik investasi PMDN maupun PMA. Dalam investasi PMDN, setelah Sumatera, minat investasi berikutnya adalah Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara. Sedangkan pada investasi PMA, setelah Sumatera, minat investasi perkebunan berikutnya adalah Irian Jaya, menyusul Sulawesi dan Jawa (Tabel 7).

Dilihat dari sebaran menurut propinsi (lampiran 1) nilai investasi PMDN terbesar terjadi di propinsi Riau (28,6 persen) menyusul Sumatera Utara (14,0 persen), Kalimantan Barat (7,5 persen), Jambi (6,7 persen), Sumatera Selatan (6,0 persen) dan Aceh (5,8 persen). Sedangkan pada PMA, urutan nilai investasi terbesar adalah Sumatera Utara (67 persen),

Tabel 6. Perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA yang disetujui Januari 1968 - Maret 1990

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah kegiatan	Nilai *) kegiatan	Jumlah	Nilai *)
1968	2	0,3	1	13,5
1969	1	0,6	1	1,5
1970	3	13,7	26	22,2
1971	4	2,7	-	-
1972	7	6,5	-	-
1973	16	22,3	1	0,8
1974	4	11,8	-	-
1975	5	10,9	-	-
1976	2	36,2	2	63,8
1977	9	46,8	3	19,5
1978	11	36,9	1	2,5
1979	10	58,8	2	11,6
1980	23	160,8	2	7,5
1981	23	287,1	5	189,9
1982	32	398,5	2	28,9
1983	29	282,0	2	15,6
1984	11	187,5	-	-
1985	33	632,9	6	206,6
1986	62	1.791,7	9	88,4
1987	91	2.697,5	6	47,4
1988	82	2.419,1	5	34,7
1989	90	3.131,7	2	76,9
1990	6	503,2	1	5,2
Jumlah	555	12.729,5	77	836,6
Trend (%/th)	12,48	17,8	-0,73	9,0

Keterangan: *) PMDN dalam milyar rupiah; PMA dalam US \$ juta.

Sumber: BKPM (diolah)

menyusul Lampung (16,4 persen) dan Irian Jaya (7,5 persen).

c. Komoditi yang Diminati

Dari jenis-jenis komoditi yang disetujui untuk dikembangkan, dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu investasi untuk suatu komoditi tertentu (single), dan investasi suatu usaha untuk lebih dari satu komoditi. Investasi untuk satu komoditi tertentu umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu dalam rangka perluasan usaha seperti kebun atau pembangunan industri pengolahan. Sedangkan pada

investasi untuk komoditi ganda dilakukan baik secara integrasi vertikal maupun diversifikasi komoditas. Pengertian diversifikasi vertikal adalah penyatuan pengelolaan perusahaan dimana produk yang satu menjadi masukan untuk komoditi lain (Machlup, 1952 dalam Pakpahan A. 1990). Contoh dari usaha investasi ini antara lain (1) pembangunan kebun kelapa sawit, dan industri pengolahan minyak sawit dan inti sawit serta industri minyak makan, stearin dan sebagainya, (2) pembangunan kebun karet, dilengkapi dengan pengolahan latex dan karet kering serta industri crumb rubber dan contoh, (3) pembangunan kebun tebu dilengkapi dengan industri

Tabel 7. Nilai dan indeks penyebaran investasi di sub sektor perkebunan menurut pulau (1968-1990)

Pulau	PMDN		PMA	
	Milyar rupiah	Indeks penyebaran *)	US \$ juta penyebaran	Indeks
1. Jawa	655,9 (5,1)	0,41	30,2 (3,6)	0,23
2. Sumatera	8.969,1 (70,5)	1,27	709,9 (84,9)	15,27
3. Kalimantan	1.715,5 (13,5)	1,00	-	-
4. Sulawesi	861,1 (6,8)	0,64	34,3 (4,1)	0,81
5. Nusa Tenggara	24,2 (0,2)	0,17	-	-
6. Maluku (1,5)	188,1	0,38	-	-
7. Irian Jaya	313,9 (2,4)	0,86	62,2 (7,4)	0,45
Total	12.727,7	-	836,6	-

() : Persen terhadap total

$$\text{Indeks Penyebaran } I_{ij} = \frac{K_{ij/i} K_{ij}}{j K_{j/ij} K_{ij}}$$

 I_{ij} = adalah indeks penyebaran untuk sub sektor ke i di wilayah k_j K_{ij} = adalah jumlah investasi pada sub sektor i di wilayah j

Sumber: BKPM (diolah)

prossesing gula dan tetes. Sedangkan investasi yang bersifat diversifikasi komoditas yang dimaksud adalah investasi komoditi dengan komoditi yang berbeda sebagai penambahan produk baru. Contoh yang dapat dikemukakan seperti investasi karet, teh, coklat dan kelapa serta lainnya.

Secara garis besar kegiatan investasi di perkebunan tersebut juga dapat digolongkan dalam kegiatan budidaya tanaman dan industri pengolahan. Dengan mengelompokkan berdasarkan jenis investasi budidaya dan pengolahan, jenis komoditi dan urutannya tercantum dalam Lampiran 2. Dari data tersebut terlihat secara umum komoditi yang diusahakan pada investasi PMDN dan PMA tidak berbeda. Beberapa komoditi yang relatif banyak me-

narik minat investor adalah komoditi coklat, karet dan kelapa (sawit dari mulai budidaya sampai ke pengolahannya).

IV. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DI BIDANG INVESTASI

Pentingnya pengembangan sektor swasta dan peran investasi dalam pembangunan telah lama dipikirkan pemerintah, sehingga sejak tahun 1967 telah pula diundangkan tentang penanaman modal PMDN dan PMA. Perkembangan sektor perkebunan sendiri tidak lepas dari peran swasta. Seperti telah diuraikan dimuka swasta sangat berperan besar. Pemerintah

telah pula terus mendorong tumbuhnya sektor swasta di perkebunan sejalan dengan program-program pengembangan perkebunan rakyat.

Untuk lebih menarik investor menanamkan modalnya baik di sub sektor perkebunan, sektor pertanian pada umumnya ataupun di sektor-sektor lainnya, pemerintah terus menyesuaikan kebijaksanaan, baik yang langsung di bidang investasi maupun kebijaksanaan di sektor lain seperti moneter, fiskal, perhubungan, perdagangan, industri dan lainnya yang semuanya bertujuan memberikan kemudahan dan situasi yang menguntungkan untuk investasi.

Beberapa rentetan kebijaksanaan tersebut dapat diuraikan antara lain (HL. Gaol dan A. Salam, 1990, Priono T, 1991).

- 1) Undang-undang No.1 tahun 1967 dan Undang-undang No.6 tahun 1968 tentang penanaman modal PMDN dan PMA;
- 2) Kebijaksanaan devaluasi 15 Nopember 1978 (Kenop 15) dan 30 Maret 1983, yaitu kebijaksanaan penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan memberikan kemudahan ekspor dalam rangka peningkatan daya saing komoditas ekspor;
- 3) Deregulasi perbankan 1 Juni 1983, merupakan kebijakan dalam rangka menggalakkan mobilisasi dana masyarakat dalam menghimpun dana;
- 4) Inpres No.4 tahun 1985, dalam rangka peningkatan efisiensi dan daya saing komoditas di pasar internasional melalui : (a) penyederhanaan tataniaga impor, ekspor dan pabeaan, (b) memperlancar arus barang dan dokumen, dan (c) penyempurnaan pelayanan dan tatalaksana operasi pelabuhan;
- 5) Paket 6 Mei 1986 (PAKEM), bertujuan untuk mendorong kegiatan swasta untuk meningkatkan ekspor non migas, meningkatkan penanaman modal asing dan nasional. Kebijaksanaan PAKEM ini secara khusus lebih banyak berperan dalam merangsang dan mengatur investasi melalui 9 hal pokok yaitu (a) pemberian fasilitas bagi penggunaan barang modal produksi dalam negeri PMA dan PMDN, (b) diberlakukannya Daftar Skala Prioritas Investasi, (c) perlakuan bagi perusahaan PMA dengan mayoritas saham nasional, (d) investasi PMA pada perusahaan lain, (e) pemilikan saham perusahaan nasional dalam PMA, dan (f) jumlah investasi minimum bagi PMA;
- 6) Paket 25 Oktober 1986, yang dimaksudkan untuk menurunkan biaya komoditi non migas dengan penurunan biaya masuk sejumlah bahan baku dan bahan penolong, perlindungan melalui tarif terhadap industri dalam negeri dan merangsang penanaman modal dari luar negeri;
- 7) Deregulasi Januari 1987, yang mengatur penyederhanaan ketentuan impor, pembebanan dan peninjauan bea masuk pada cabang industri tertentu serta penyempurnaan klasifikasi barang dan tarif pas;
- 8) Paket 10 Juni 1987, yang bertujuan meningkatkan penanaman modal dan mendorong ekspor non-migas melalui kebijaksanaan memperoleh pembangunan sektor industri, penyederhanaan dan pemberian kemudahan ijin usaha industri;
- 9) Paket 24 Desember 1987 (Pakdes 1987), melalui penyederhanaan ijin ekspor, pembebasan dan penurunan tarif bea masuk pas, pemberian fasilitas bea masuk dan PPN bagi usaha yang mengeluarkan hasil produksinya, pendirian tempat-tempat pelayanan dan meringankan persyaratan pemilikan saham nasional dalam PMA;
- 10) Paket Oktober 1988, melalui peningkatan penyerahan dana masyarakat, mendorong peningkatan ekspor migas, efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, pengendalian kebijaksanaan moneter dan penciptaan iklim pengembangan pasar modal;
- 11) Paket Nopember 1988, melalui penyempurnaan tataniaga impor barang, deregulasi di bidang perdagangan, pemberian kemudahan terhadap produksi untuk ekspor dan deregulasi di bidang perhubungan laut;
- 12) Paket Oktober 1993 tentang dimungkinkannya pemilikan modal PMA 100 persen dan fasilitas pemberian ijin perolehan lahan HGU;
- 13) Lainnya.

Gencarnya berbagai kebijaksanaan pemerintah untuk menarik investor telah menunjukkan hasilnya. Dalam Tabel 6 terlihat perkembangan jumlah dan

nilai investasi meningkat pesat, dan ini terjadi terutama sejak tahun 1983.

V. PERAN INVESTASI DALAM PEREKONOMIAN, KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan sub sektor perkebunan di Indonesia tidak lepas dari peran investasi. Beberapa hasil dari investasi tersebut berperan dalam beberapa hal antara lain.

a. Peningkatan Produksi Perkebunan

Meningkatkan aktivitas investasi swasta dan program-program pemerintah di bidang perkebunan telah meningkatkan luas areal dan produksi perkebunan. Dalam Tabel 8 terlihat dalam tahun 1984-1992 areal perkebunan meningkat dari 9.453 ribu hektar menjadi 12.148 ribu hektar. Dan produksi perkebunan meningkat dari 6.847 ribu ton menjadi 10.974 ribu ton. Dari tabel tersebut juga terlihat walaupun secara nominal peran perkebunan rakyat

masih dominan, pangsa perkebunan besar baik perkebunan negara maupun swasta terus meningkat.

b. Perkembangan Ekspor

Sejalan dengan peningkatan produksi perkebunan, ekspor produk perkebunan meningkat pula, baik produk primer maupun produk manufaktur perkebunan. Walaupun ekspor produk perkebunan masih didominasi produk primer, peningkatan ekspor produk manufaktur perkebunan meningkat lebih cepat. Dalam tahun 1983-1990 nilai ekspor produk perkebunan meningkat dengan laju 5,94 persen per tahun. Nilai ekspor produk manufaktur meningkat dengan laju 30,16 persen per tahun dan produk primer 5,38 persen per tahun (Tabel 9).

c. Peran Terhadap Nilai Tambah

Meningkatnya investasi dan pengembangan komoditi berakibat langsung terhadap peningkatan produksi komoditi, dan ini berarti berperan dalam penerimaan negara (PDB). Upaya peningkatan produksi juga berperan baik dalam rangka memenuhi

Tabel 8. Peran dari perusahaan rakyat, perusahaan besar milik negara dan perusahaan besar swasta dalam areal dan produksi perkebunan

	1984	1987	1989	1992
A. Luas Areal (000 ha)	9.453,2	10.300,5	10.944,2	12.148,7
1. Perkebunan Rakyat	8.145,4 (86,2)	8.910,4 (86,5)	9.328,8 (85,2)	9.964,4 (82,0)
2. Perkebunan Besar Negara	792,2 (8,4)	841,4 (8,2)	913,8 (8,1)	2.184,3
3. Perkebunan Besar Swasta	515,5 (5,4)	548,7 (5,3)	701,7 (6,5)	(18,0)
B. Produksi (000 ton)	6.847,3	8.148,3	9.455,7	10.973,7
1. Perkebunan Rakyat	4.543,6 (66,3)	5.359,3 (63,5)	6.001,3 (49,0)	5.377,6
2. Perkebunan Besar Negara	1.657,4 (24,2)	2.059,2 (25,3)	2.504,3 (26,5)	5.596,1
3. Perkebunan Besar Swasta	646,3 (9,5)	729,8 (8,9)	950,1 (10,0)	(51)

Sumber : Statistik Perkebunan Ditjenbun.

Tabel 9. Nilai ekspor produk perkebunan, tahun 1985-1990 (US \$ ribu)

Tahun	Produk	Produk	Jumlah
1983	1.782.393	16.256	1.798.649
1984	2.137.574	19.804	2.157.378
1985	2.109.259	19.227	2.128.486
1986	2.231.433	23.176	2.254.609
1987	2.331.346	47.362	2.378.708
1988	2.858.878	81.395	2.940.273
1989	2.495.164	96.559	2.591.723
1990	2.696.891	125.605	2.822.496
Trend %	5,38	30,16	5,94

Sumber: Statistik Perkebunan, Ditjen Bun

kebutuhan sendiri maupun dalam rangka pengembangan ekspor non migas, dengan demikian berperan sebagai sumber devisa baik dan aktivitas ekspor maupun substitusi impor. Dalam periode tahun 1978-1982. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor perkebunan telah meningkat dari 1.205 milyar dalam tahun 1978 menjadi 8.407 milyar dalam tahun 1992 atau peningkatan sebesar 7,0 kali. Sejalan dengan prioritas pengembangan yang lebih menekankan kepada pengembangan perkebunan rakyat, maka peningkatan PDB lebih besar terjadi pada perkebunan rakyat tersebut yaitu 7,6 kali, sedangkan PDB dari perkebunan besar meningkat 5,7 kali (Tabel 10).

Dengan menggunakan parameter ICOR (Incremental Capital Output Rasio) yang didefinisikan sebagai pertambahan modal dibagi dengan pertambahan nilai tambah, nilai koefisien ICOR perkebunan tahun 1984-1989 diperoleh sebesar 10,66. Angka ini relatif paling tinggi dibanding di sub sektor pertanian lain (Tabel 11). Tingginya angka ICOR tersebut berkaitan dengan meningkatkan kegiatan investasi pada masa-masa tersebut. Nilai 10,66 berarti dalam periode tersebut penambahan investasi 10,66 kali lebih cepat dari PDB sub sektor bersangkutan. Barangkali nilai ICOR tersebut akan sangat berbeda pada masa 5 sampai 10 tahun kemudian dimana tanaman telah berproduksi.

Tabel 10. Peran pertanian dan perkebunan terhadap PDB atas dasar harga berlaku

	1978	1984	1992
A. Nilai PDB (milyar rupiah)			
1. Perkebunan rakyat	801,0	2.738,7	6.105,8
2. Perkebunan besar	404,5	593,0	301,4
3. Total perkebunan	1.205,5	3.331,7	8.407,2
B. % terhadap Sektor Pertanian *)			
1. Perkebunan rakyat	11,9	13,5	12,4
2. Perkebunan besar	6,0	2,9	4,7
3. Total perkebunan	17,9	16,4	17,1
C. % terhadap Total Sektor			
1. Perkebunan rakyat	8,4	3,1	2,4
2. Perkebunan besar	4,2	0,7	0,9
3. Total perkebunan	12,6	3,8	3,3

Keterangan: *) Tidak termasuk kehutanan.

Sumber: BPS.

Tabel 11. Perubahan PDB, jumlah investasi baru dan ICOR, periode 1984-1989

Sektor	Perubahan PDB 1984-1989 (1)	Investasi Baru 1984-1989			ICOR (4):(1)
		PMDN (2)	PMA (3)	Total (4)=(2)-(3)	
Tanaman pangan	2.907,2	1.082,5 (86,5)	168,3 (13,5)	1.250,8 (100,0)	0,43
Perkebunan	855,5	8.855,7 (93,8)	562,9 (6,2)	9.118,6 (100,0)	10,66
Peternakan	684,2	440,5 (80,3)	108,4 (19,7)	54896 (100,0)	0,80
Perikanan	617,3	437,5 (44,3)	550,6 (55,7)	988,1 (100,0)	1,60

1) Harga-harga disesuaikan berdasarkan harga konstan tahun 1984.

Sumber: 1) BPS
2) BKPM
3) Dirjen Perikanan

d. Peningkatan Kesempatan Kerja

Berkembangnya aktivitas usaha seperti halnya di sub sektor perkebunan telah membuka kesempatan kerja. Dalam tahun 1987 di sub sektor perkebunan telah terlibat 9,8 juta orang, sebagian besar (91 persen) di sub sektor perkebunan rakyat (Madecor, 1989). Sementara itu dalam tahun 1968-1990, kegiatan investasi di sub sektor perkebunan telah membuka kesempatan kerja dalam negeri sekitar 1.002.251 orang. Peran investasi PMDN dalam penyerapan tenaga kerja tersebut relatif lebih besar yaitu 988.495 orang, sedangkan investasi PMA sebesar 13.756 orang. Dilihat dari penyebarannya per propinsi, jumlah tenaga kerja yang terserap disamping ditentukan oleh jumlah kegiatan/proyek, juga dipengaruhi oleh sifat investasinya, dalam hal ini berkaitan erat dengan aktivitas dan komoditi yang diusahakan. Data yang ada sulit untuk memilah besarnya penyerapan tenaga kerja dari investasi tiap komoditi, mengingat sifat investasi umumnya terintegrasi dan atau diversifikasi komoditi. Berdasarkan sebaran jumlah proyek dan tenaga yang terserap, penyerapan tenaga kerja akibat investasi di sub sektor perkebunan terbesar terjadi di Riau, menyusul Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan

Sulawesi Utara. Besarnya kesempatan kerja di atas belum termasuk keterlibatan keluarga (lampiran 3).

e. Peningkatan dan Perataan Pendapatan Masyarakat

Kegiatan investasi di perkebunan telah berperan dalam pembangunan sub sektor perkebunan, peningkatan pendapatan nasional dan perluasan kesempatan kerja. Meningkatnya pendapatan nasional sebagai akibat positif investasi telah memungkinkan pelayagunaannya bagi pembangunan, baik di dalam sektor perkebunan itu sendiri, sektor pertanian maupun sektor lainnya. Dengan demikian berdampak terhadap penciptaan pendapatan, distribusi dan perataan pendapatan. Dampak positif bagi penciptaan dan distribusi pendapatan dari investasi di sub sektor perkebunan juga terjadi dari jumlah tenaga kerja yang terhidupi secara langsung sebagai pekerja dan buruh yang tercipta akibat adanya investasi tersebut, serta penciptaan pendapatan dan aktivitasnya dalam program PIR.

Dilihat dari pelayagunaan sumberdaya, upaya peningkatan produksi, membuka kesempatan kerja dan perataan pendapatan masyarakat, aktivitas yang melibatkan pihak swasta besar/BUMN dalam pening-

katan produksi perkebunan dan perbaikan perkebunan rakyat seperti dalam POLA PIR merupakan langkah yang strategis. Di satu sisi ketersediaan tenaga kerja bagi aktivitas produksi terutama budidaya komoditi dapat tersedia, dan resiko produksi dapat terbagi antara Inti dengan Plasma, di sisi lain pihak plasma (masyarakat petani) ikut menikmati nilai tambah hasil perkebunan. Hasil studi menunjukkan tingkat pendapatan petani dan kebun utama PIR cukup besar, antara 746 ribu rupiah sampai 1.712 ribu rupiah per hektar per tahun tergantung dari umur dan kondisi tanaman (Lampiran 4).

Tingkat pendapatan petani PIR perkebunan tersebut umumnya meningkat dengan peningkatan umur dan produksi. Disamping itu melalui program PIR juga terbuka sumber-sumber pendapatan baru, disamping dari komoditi utama tersebut, juga dari lahan pangan, pekarangan, berburuh dan kegiatan non pertanian lain. Studi Madecor (1981) menunjukkan pada Petani PIR, peran tanaman utama tersebut hanya berkisar antara 29,7 persen sampai 37 persen.

f. Pengembangan Wilayah

Masuknya kegiatan investasi kedalam suatu wilayah berarti menumbuhkan aktivitas dalam rangka pendayagunaan sumberdaya, baik sumberdaya lahan, modal dan tenaga kerja. Tumbuhnya aktivitas seperti budidaya dan pengolahan komoditi perkebunan sebagai contoh, disamping dibutuhkan prasarana dan sarana juga akan menciptakan prasarana dan sarana baru dan memungkinkan tumbuh pula kegiatan lain seperti transportasi, jasa dan sebagainya dan ini berarti aktivitas investasi tersebut berperan besar dalam pusat-pusat pengembangan wilayah baru. Penciptaan pengembangan wilayah baru tersebut sangat berdampak besar baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan Hankam. Di bidang ekonomi, tumbuhnya pengembangan wilayah baru bagi kegiatan produksi antara lain akan meningkatkan pendapatan regional dan nasional, dan memungkinkan terbukanya kesempatan kerja. Di bidang sosial, kegiatan investasi yang umumnya membawa modernisasi akan merubah perilaku sosial masyarakat setempat. Dan masuknya sesuatu yang baru pada suatu wilayah juga akan ber-

pengaruh terhadap politik dan hankam baik yang positif maupun negatif.

g. Peningkatan Kemampuan Teknologi dan Manajemen

Pengikutsertaan swasta dalam kegiatan investasi khususnya di perkebunan berperan dalam mempercepat pembangunan. Masuknya pihak swasta tersebut umumnya diikuti oleh kemampuan dalam bidang teknologi, manajemen dan permodalan. Pemakaian teknologi dan manajemen yang lebih baik disamping akan meningkatkan efisiensi, juga memungkinkan peningkatan kualitas hasil, sehingga dimungkinkan dapat bersaing di pasar, baik pasar dalam negeri maupun ekspor. Penerapan teknologi dan manajemen yang lebih baik juga memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat belajar bagi pengembangan perkebunan rakyat. Upaya peningkatan dan penyebaran teknologi dan manajemen yang lebih baik bagi perkebunan rakyat secara langsung juga dilakukan dalam satu sistem PIR dimana pihak swasta dan BUMN berperan langsung membina perkebunan rakyat sebagai inti.

VI. KENDALA DAN PROSPEK INVESTASI DI PERKEBUNAN

a. Kendala Investasi

Berbeda dengan sifat investasi di sektor lainnya seperti industri, perbankan dan sebagainya, kegiatan penanaman modal di sub sektor perkebunan khususnya di bidang budidaya, seperti halnya di sektor pertanian pada umumnya mempunyai beberapa kelemahan yang menurunkan tingkat keunggulan kompetitifnya, yaitu antara lain **pertama**, investasi di perkebunan memerlukan modal awal yang besar terutama dalam penggarapan lahan dalam luas areal yang besar, **kedua**, jangka waktu yang panjang untuk sampai produksi, **ketiga**, resiko kegagalan yang tinggi sebagai akibat faktor alam seperti musim, lahan, air dan hama penyakit dan **keempat**,

seringkali berlokasi di daerah terpencil atau wilayah bukaan baru dimana ketersediaan prasarana dan sarana relatif terbatas. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor mengapa minat investasi di sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan relatif rendah dibandingkan sektor lain.

Kendala lain yang sangat berpengaruh terhadap minat investasi terutama investor skala menengah dan kecil adalah situasi usaha yaitu antara lain :

- (1) Masalah dana/kredit perbankan, khususnya yang menyangkut tingginya tingkat bunga untuk investasi. Tingginya suku bunga disamping menghambat aktivitas investasi juga menurunkan prioritas investasi di sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan yang mempunyai daya pengembalian modal lebih lama.
- (2) Dengan tingginya suku bunga tersebut kemampuan untuk mendayagunakan dana kredit menjadi terbatas sehingga investor harus menyediakan dana sendiri lebih besar. Dengan kondisi demikian maka hanya investor bermodal kuat saja yang menanamkan modalnya, khususnya dalam rangka penanaman modal PMDN.
- (3) Minat investasi di perkebunan juga menghadapi kendala pasar hasil produksi. Situasi pasar dunia, komoditi perkebunan seperti pertanian lain pada umumnya cenderung menurun, akibat adanya persaingan dari negara lain yang mengembangkan komoditi yang relatif sama, dan hambatan tarif dan non tarif dari negara importir.
- (4) Minat investasi menjadi terhambat terutama di luar Jawa karena keterbatasan infrastruktur yang ada, beberapa keterbatasan infrastruktur di luar Jawa tersebut terutama listrik, dan tenaga terampil, kondisi tersebut menjadi kendala baik investasi PMDN maupun PMA.
- (5) Bagi investasi PMA, disamping keterbatasan yang ada dalam faktor investasi di Indonesia, investasi asing juga dihadapkan kepada (1) Keterbatasan dana investasi sebagai akibat saat ini lebih banyaknya aliran dana dari negara maju ke negara maju dan (2) munculnya alternatif dari negara lain untuk menaruh investasi tersebut sebagai pesaing dengan berbagai fasilitas yang lebih merangsang.

- (6) Seringkali birokrasi terutama dalam perijinan masih belum mendukung. Seringkali masih dibutuhkan waktu yang cukup lama agar kegiatan proyek dapat berjalan.
- (7) Seringkali pula suatu proyek yang telah disetujui terhambat karena adanya masalah dalam penyediaan lahan.
- (8) Dalam keterlibatannya dalam program PIR pihak Inti baik swasta maupun BUMN merasa keikutsertaan dalam program tersebut lebih banyak merupakan program pengabdian kepada masyarakat, karena penanganan program tersebut berarti melibatkan diri kepada masalah-masalah sosial yang sangat menghambat dalam pelaksanaannya. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PIR antara lain dalam status peserta dan kepemilikan lahan, dan pasca kredit.

b. Prospek Investasi Mendatang

Banyak kendala dihadapi dalam menarik minat swasta untuk melakukan investasi khususnya di sub sektor perkebunan. Di masa mendatang, hambatan untuk menarik investasi di perkebunan tersebut semakin besar, karena semakin dirasakan bahwa modal merupakan komoditi yang semakin langka keberadaannya. Iklim investasi juga tergantung pada situasi perekonomian Indonesia dan dunia. Walaupun demikian beberapa kondisi memberikan peluang besar untuk melakukan investasi di Indonesia terutama di sub sektor perkebunan antara lain.

- (1) Situasi politik dan ekonomi dalam negeri Indonesia yang menguntungkan dalam melakukan investasi dan merupakan keunggulan dalam menarik investasi asing.
- (2) Adanya perhatian yang besar dari pemerintah tentang pentingnya investasi dan kemauan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam melakukan investasi. Adanya kebijaksanaan dan langkah-langkah deregulasi, dan debirokratisasi yang terus menerus dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk lebih menggairahkan iklim investasi di Indonesia. Beberapa kebijaksanaan terus disesuaikan baik di bidang investasi, per-

dagangan, industri, perhubungan, perpajakan, moneter dan fiskal.

- (3) Potensi sumberdaya alam Indonesia yang memungkinkan dikembangkannya komoditi-komoditi baru yang dapat memenuhi permintaan pasar.
- (4) Tersedianya sumberdaya manusia dengan upah yang kompetitif.
- (5) Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan salah satu potensi pasar.

Walaupun demikian untuk lebih menggairahkan iklim investasi khususnya di sub sektor perkebunan, beberapa langkah perlu dilakukan antara lain : (a) Lebih diintensifikannya informasi tentang peraturan, cara-cara dan prosedur penanaman modal serta promosi penanaman modal, serta kemudahan dalam penyelesaian kepengurusan masalah investasi, HGU, perijinan dan lain-lain, dan (b) Pemberian informasi tentang potensi wilayah dan identifikasi lahan potensial serta situasi dunia dan prospek pengembangan komoditi. Untuk itu setiap kegiatan investasi haruslah telah dilakukan studi mendalam.

VII. KESIMPULAN

Sub sektor perkebunan telah tumbuh dengan cukup pesat baik dilihat dari areal, produksi maupun sumbangannya terhadap penerimaan devisa. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijaksanaan pemerintah dalam merangsang tumbuhnya investasi sub sektor perkebunan.

Selama periode tahun 1968-1990, penanaman modal di sub sektor perkebunan tumbuh cukup pesat baik PMDN maupun PMA dan semakin menyebar ke seluruh wilayah propinsi. Tumbuhnya investasi ini disebabkan oleh berbagai kemudahan yang diberikan melalui berbagai paket kebijaksanaan deregulasi di bidang investasi, perdagangan, transportasi, industri, perpajakan, fiskal dan moneter; serta semakin baiknya infrastruktur ekonomi khususnya di luar Jawa.

Investasi di sub sektor perkebunan umumnya bersifat integrasi vertikal dan atau diversifikasi ko-

moditi, dalam kegiatan budidaya dan pengolahan. Komoditi perkebunan yang diminati oleh investor baik PMDN maupun PMA berturut-turut coklat, karet, kelapa sawit dan teh.

Beberapa sifat atau kondisi kurang menguntungkan dalam investasi di perkebunan antara lain: a) diperlukan investasi awal besar; b) jangka waktu untuk memulai produksi lama; c) resiko yang tinggi karena faktor alam/musim; d) umumnya berada di daerah terpencil yang miskin sarana dan prasarana. Disamping itu kendala yang dihadapi dalam menghimpun investasi saat ini adalah karena dirasakannya mahal dan langkanya sumber modal sebagai akibat tingginya suku bunga, pasar hasil perkebunan di pasar dunia yang cenderung menurun, dan persaingan dengan negara lain yang lebih kompetitif dan kendala yang menyangkut kemudahan dalam pelayanan investasi.

Walaupun demikian minat investasi di perkebunan dimasa mendatang masih cukup baik, hal ini didukung oleh adanya: a) situasi politik dan ekonomi yang stabil; b) adanya kemauan dan perhatian pemerintah yang demikian besar dengan dikeluarkannya beberapa paket deregulasi; c) tersedianya sumberdaya alam yang memungkinkan dan sumberdaya tenaga kerja yang relatif murah dan d) potensi pasar dalam negeri yang begitu besar.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk lebih menggairahkan iklim investasi di perkebunan adalah: a) lebih mengintensifkan informasi dan promosi tentang penanaman modal; b) pemberian jasa tentang informasi potensi wilayah dan lahan potensial bagi investasi, layanan informasi tentang prosek komoditi dan c) kemudahan dalam penyelesaian perijinan dan pelaksanaan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Perencanaan Departemen Pertanian, 1991. Statistik Ekspor-Import Hasil-Hasil Pertanian 1969-1990. Jakarta.
- BKPM, 1991. Evaluasi Penanaman Modal Tahun 1991 dan Prospek Tahun 1992. Desember 1991.
- Ditjen Perkebunan 1989. Peningkatan Minat Investasi Swasta pada Sub Sektor Perkebunan. Upaya dan Hasil yang Dicapai. Himpunan Laporan Bulanan Januari s/d Juni 1989.
- _____. 1989. Pengembangan Perkebunan Besar Swasta Nasional. Himpunan Laporan Bulanan, Januari s/d Juni 1989.

- _____. 1990. KIK Plasma PIR, Bagian Terobosan Penyediaan Dana untuk Pengembangan Perkebunan. Laporan Bulanan Januari 1990.
- _____. 1991. Perkebunan Besar Swasta Sebagai Integral dari Pengembangan Sub Sektor Perkebunan, Upaya dan Hasil yang Dicapai. Laporan Bulanan November 1991.
- _____. 1991. Laporan Tahunan 1990/1991. Penyelenggaraan PIR-TRANS. Laporan Bulanan, September 1991.
- _____. 1991. Kerangka Operasi Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus. Dokumentasi.
- _____. 1991. Kerangka Operasi Pendanaan Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus. Dokumentasi, Pebruari 1991.
- HL. Gaol dan A. Salam. 1990. Dampak Kebijakan Deregulasi Terhadap Diversifikasi: Dalam Diversifikasi Dalam Proses Percepatan Laju Pembangunan Nasional. PERHEPI.
- Madecor, 1989. Socio Economic Study of the NES Project. Directorate General of Estates, Ministry of Agriculture.
- Pakpahan A. 1990. Refleksi Diversifikasi dalam Teori Ekonomi, Dalam Diversifikasi Pertanian Dalam Proses Percepatan Laju Pembangunan Nasional. PERHEPI.
- Prijono. T. 1991. Kebijakan Pemerintah Mengenai Penyesuaian Struktur dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. Mimbar BP7. No. 54 hal 74-80.

Lampiran 1. Sebaran investasi menurut daerah dari kegiatan investasi dalam Januari 1968 - Maret 1990

Propinsi	PMDN			PMA			Negara Investor
	Jumlah kegiatan	Nilai (milyar Rp)	%	Jumlah kegiatan	Nilai (milyar Rp)	%	
1. Aceh	19	740,4	5,8	1	7,5	0,9	Inggris
2. Sumatera Utara	76	1.781,5	14,0	33	560,4	67,9	Inggris, Belgia, Amerika S.
3. Riau	73	3.647,4	28,6	-	-	-	
4. Sumatera Selatan	39	770,2	6,0	2	0,6	0,07	Belgia
5. Bengkulu	15	272,6	2,1	-	-	-	
6. Jambi	11	857,8	6,7	-	-	-	
7. Sumatera Barat	23	541,6	4,2	3	4,3	0,5	Gabungan
8. Lampung	33	357,6	2,8	2	137,0	16,4	Hongkong
A. Sumatera	287	8.969,1	70,5	41	709,8	84,8	
9. Jawa Barat	54	486,9	3,8	8	13,7	1,6	Inggris, Jepang, Panama
10. Jawa Tengah	20	75,2	0,6	8	3,1	0,4	Panama, Jepang, Inggris, India
11. Jawa Timur	32	80,2	0,6	7	13,4	1,6	Inggris, Jepang, Hongkong, Panama
12. DKI	1	4,6	0,04	-	-	-	
13. Yogyakarta	3	8,9	0,06	-	-	-	
B. Jawa	110	655,8	5,1	21	30,3	3,6	
14. Kalimantan Selatan	15	168,8	1,3	-	-	-	
15. Kalimantan Barat	33	1.009,4	79,13	-	-	-	
16. Kalimantan Timur	13	451,8	3,5	-	-	-	
17. Kalimantan Tengah	4	85,5	0,7	-	-	-	
C. Kalimantan	71	1.715,5	13,5	-	-	-	
18. Sulawesi Utara	5	213,8	1,7	1	0,9	0,1	Jepang
19. Sulawesi Tengah	15	266,6	2,1	1	1,1	0,1	Jerman
20. Sulawesi Tenggara	-	-	-	1	15,0	1,8	Amerika Serikat
21. Sulawesi Selatan	38	380,7	3,0	7	17,13	2,1	Jepang, Inggris
D. Sulawesi	58	861,1	6,8	10	33,4	4,1	
22. Bali	1	1,8	0,01	-	-	-	
23. NTB	2	3,0	0,02	-	-	-	
24. NTT	4	21,1	0,17	-	-	-	
E. Nusa Tenggara	7	26,0	0,2	-	-	-	
25. Maluku	10	188,1	1,5	-	-	-	
26. Irian Jaya	10	313,9	2,4	5	62,2	7,5	Inggris
F. Maluku dan Irja	20	502,0	3,9	5	62,2	7,5	

Sumber: BKPM (diolah)

Lampiran 2. Komoditi yang diminati dan disetujui untuk diinvestasi selama periode Januari 1968 - Maret 1990

Jenis komoditi usaha	Budidaya komoditi			Jenis komoditi usaha	Pengolahan		
	Jumlah usaha	Kapasitas	Satuan		Jumlah usaha	Kapasitas	Satuan
A. PMDN							
1. Coklat dan biji coklat	162	497.119	ton	1. Minyak sawit, inti sawit	183	5.577.558	ton
2. Karet	42	1.019.783	ton	2. Crumb rubber, karet kering, latex	117	11.384.853	ton
3. Teh	39	1.347.566	ton	3. Kopra	56	104.165	ton
4. Kelapa sawit	27	3.327.760	ton	4. Minyak kelapa	16	34.015	ton
5. Kopi	21	22.296	ton	5. Palm knell	13	200.093	ton
6. Tanaman serat	12	2.059.625	ton	6. Olein/stearin	12	150.603	ton
7. Kelapa	11	20.375.130	butir	7. Fee fatty acid	10	291.262	ton
8. Cengkeh	11	730	ton	8. Gula/tetes	7	467.929	ton
9. Jambu mente	7	3.378	ton	9. Glyserine	4	11.860	ton
10. Lada	6	2.507	ton	10. Arang tempurung	1	32.009	ton
11. Kina	6	328.590	ton	11. Benang sutera	1	6	ton
12. Pala	4	3.957	ton				
13. Tembakau	3	2.002.560	ton				
14. Jarak	3	10.450	ton				
15. Vanili	2	146.715	ton				
16. Kapas	2	9.500	ton				
17. Tan. minyak atsiri	2	138	ton				
18. Kayu manis	1	22.295	ton				
19. Janjang	1	79.832	ton				
20. Tebu	1	1.600	ton				
21. Indigo	1	360	ton				
22. Casineri	1	300	ton				
23. Kokon	1	50	ton				
B. PMA							
1. Karet	12	56.935	ton	1. Minyak/inti sawit	21	692.708	ton
2. Coklat	8	9.142	ton	2. Crumb rubber/cheet	5	40.478	ton
3. Teh	6	216.599	ton	3. Kopra	5	63.372	ton
4. Kelapa	2	1.086.258	ton	4. Olein/stearin	4	94.888	ton
5. Kelapa sawit	2	70.297	ton	5. Freeafatty acid	3	4.170	ton
6. Kapas	2	70.000	ton	6. Gula dan tetes	3	116.000	ton
7. Indigo	2	69.890	ton	7. Palm kernel	2	16.422	ton
8. Kopi	1	920	ton	8. Minyak biji kapas	1	20.000	ton
9. Minyak atsiri	1	95	ton	9. Bungkil kelapa	1	12.000	ton
10. Kayu manis	1	30	ton	10. Kopi ekstrak/bubuk	1	360	ton

Keterangan: % terhadap jumlah kegiatan investasi keseluruhan.

Sumber: BKPN (diolah)

Lampiran 3. Penyebaran tenaga kerja Indonesia yang terserap dalam investasi perkebunan tahun 1968-1991 per propinsi

Propinsi	Jumlah kegiatan proyek	Jumlah tenaga kerja terserap
1. Jawa Barat	37	115.86
2. Jawa Tengah	15	66.932
3. Jawa Timur	17	103.789
4. Yogyakarta	3	579
5. DKI	-	-
6. Aceh	13	21.275
7. Sumatera Utara	47	95.870
8. Riau	58	189.926
9. Sumatera Selatan	28	43.013
10. Bengkulu	10	10.009
11. Jambi	7	40.260
12. Lampung	23	44.156
13. Sumatera Barat	15	36.224
14. Sulawesi Selatan	20	12.714
15. Sulawesi Tengah	12	6.766
16. Sulawesi Tenggara	1	136
17. Sulawesi Utara	3	881
18. Kalimantan Selatan	12	96.948
19. Kalimantan Barat	16	48.861
20. Kalimantan Timur	14	25.016
21. Kalimantan Tengah	3	12.873
22. Bali	1	200
23. N.T.B	0	0
24. N.T.N	4	935
25. Maluku	10	18.280
26. Irian Jaya	10	10.747
Total	426	1.002.251

Sumber: BKPM (diolah)

Lampiran 4. Analisa pendapatan petani dan usahatani yang diterima petani per hektar per tahun, tahun 1991 di 4 PIR BUN Kasus

Uraian	PIR-LOK Sawit Bandar Deli Serdang	PIR ADB Sawit Besitang Langkat	PIR Teh Pasoburan Tapanuli Utara	PIR-Lok P.T. Paya Pinang Pematang Siantar
1. Nilai hasil kotor	2.760.000	1.859.787	1.879.337	1.935.000
2. Biaya total	477.300	562.140	96.500	632.840
a. Pupuk dan obat-obatan	50.000	134.737	211.840	96.500
b. Pemeliharaan	61.000	132.307	-	231.000
c. Panen dan angkut	300.000	272.589	-	190.500
d. Gaji ketua kelompok dan penjaga	52.100	-	-	-
e. PBB dan lain-lain	14.200	29.552	-	-
3. Penerimaan kotor	2.282.700	1.297.647	1.782.857	1.302.160
4. Cicilan kredit	570.675 (25% *)	557.936 (30%)**	534.857 (30% *)	455.756 (35% *)
5. Pendapatan bersih petani (% pengembalian kredit)	1.712.075	739.710	1.248.000	846.404

Keterangan: *) dari penerimaan kotor.

***) dari nilai hasil kotor.